

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ketertarikan penulis untuk memahami lebih lanjut mengenai studi kawasan Asia Tenggara merupakan langkah awal dari penulisan skripsi ini. Bagi penulis, kawasan Asia Tenggara memiliki keunikan tersendiri sebagai satu komunitas regional. Kawasan ini juga penting sebagai wilayah strategis baik secara geografis maupun secara fungsional. Selain letaknya yang strategis dengan sumber daya alam yang melimpah, Asia Tenggara juga merupakan kawasan yang memiliki potensi konflik yang cukup tinggi baik dalam lingkungan domestic maupun regional seperti sengketa teritorial yang terjadi antara Negara-negara Asia Tenggara. Contohnya sengketa kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan di perbatasan antara Sabah-Malaysia dengan Kalimantan Timur-Indonesia.

Hubungan antara Indonesia dengan Negara-negara tetangga terbilang harmonis, walaupun Indonesia pernah berkonfrontasi dengan beberapa dari Negara-negara tersebut. Hal itu dikarenakan letak geografis yang dekat antara Indonesia dengan Negara yang bersangkutan. Walaupun bukan merupakan satu-satunya factor, kedekatan geografis ini merupakan factor penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu bahwa Indonesia dan Negara tetangga terlahir sebagai Negara yang hidup berdanpingan satu dengan lainnya.

Akan tetapi kedekatan geografis dan arena adanya perbedaan-perbedaan obyektif dalam ukuran, baik dalam artian luas wilayah daratan maupun perairan, jumlah penduduk dan potensi kekayaan alamnya yang demikian menyolok, justru menyebabkan dinamika dalam hubungan antar Negara tersebut sangat tinggi.

Munculnya sengketa kedaulatan antara Indonesia dan Negara tetangga sebenarnya berawal dari tidak adanya legalisasi atas batas yang semakin hari semakin bertambah. Dan juga pengelolaan yang tidak jelas atas batas Negara yang berupa pulau-pulau berpotensi dalam hal sumber daya alamnya. Pada akhirnya penyelesaian harus dilakukan dengan jalan berbelit-belit dan sangat menyulitkan kedua Negara, dan bahkan kemungkinan besar akan mengganggu hubungan baik antara Negara-negara yang berselisih tersebut.

Bagi penulis uraian di atas sangat menarik untuk dikaji. Hasil kajian singkat penulis akan berbentuk sebuah skripsi dengan judul **Upaya Republik Indonesia Menjaga Wilayah Perbatasan.**

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk menempatkan Studi Kawasan Asia Tenggara sebagai bidang ilmu yang menarik dalam Ilmu Hubungan Internasional. Penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa atas perbatasan wilayah Indonesia dan upaya yang dilakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Selain itu, penulisan ini merupakan sarana untuk mengaplikasikan konsep-konsep dan teori Ilmu Hubungan Internasional yang penulis peroleh selama kuliah. Atau dengan kata lain

menjawab perumusan masalah dengan menggunakan teori yang relevan dengan permasalahan ini. Dan yang terakhir diharapkan bisa membuktikan hipotesa dengan data dan fakta yang ada.

Secara khusus penulisan ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan pencapaian gelar sarjana Strata-1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat manusia, negara dalam melakukan pergaulan maupun transaksi antar negara tidak luput dari perselisihan, sengketa atau konflik, dalam tingkat kecil sampai tingkat serius. Sengketa antar negara merupakan sengketa yang tidak mempengaruhi kehidupan internasional akan tetapi dapat pula merupakan sengketa yang mengancam perdamaian dan ketertiban internasional.

Wilayah perbatasan Indonesia yang sangat luas memerlukan pengawasan secara kontinu, sehingga semua perubahan yang terjadi dapat diketahui dengan pasti. Pengelolaan perbatasan bukan hanya bertujuan untuk menunjukkan integritas Negara Kesatuan Indonesia saja, akan tetapi juga mempunyai prospek di bidang ekonomi, sosial, pariwisata, dan budaya.

Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia mempunyai banyak sekali masalah yang harus dicegah agar tidak meledak dan dapat merugikan Indonesia pada akhirnya. Dengan pulau-pulau yang terbentang dari pulau Benggala (wilayah paling barat Indonesia, lebih barat ketimbang Sabang) sampai pulau brass yang berbatasan dengan republik palau, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia

melakukan segala cara untuk mempertahankan integritas Indonesia tanpa harus berselisih dengan negara di dekat perbatasan tersebut.

Pada pemerintahan Soekarno, Indonesia sudah mempunyai bibit-bibit perselisihan, terutama dengan Malaysia yang kemudian masih berlanjut pada pemerintahan Soeharto. Pemerintahan yang juga disebut pemerintahan orde baru ini sudah mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Bahkan vonis mahkamah internasional yang jelas merugikan Indonesia ini juga merupakan hasil kerja pemerintahan ini. Cengkeraman birokrasi dan kekuasaan yang berlebihan ala orde baru diganti dengan bergulirnya demokrasi pada pemerintahan Habibie. Pada masa ini muncul keretakan wilayah. Timor Timur akhirnya lepas pada 1999. tiga tahun kemudian, ketika Megawati Soekarnoputri memerintah, Sipadan-Ligitan jatuh ke tangan Malaysia.

Kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki belasan ribu pulau yang bertebaran di perairan yang maha luas, sebenarnya telah dipupuk Oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Itu sebabnya dibentuk departemen baru: kelautan dan perikanan, yang dipertahankan hingga sekarang. Megawati juga pernah menyelesaikan pekerjaan rumah yang penting, memaklumkan Peraturan Pemerintah Nomor 38/2002 tentang Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Di situ ditetapkan koordinat geografis yang sebagian berada di 92 pulau terluar yang tersebar di 19 provinsi. Inilah noktah-noktah penting untuk menentukan batas wilayah perairan Indonesia.

Tahun 2004, Departemen Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan pula sebuah buku tentang pulau-pulau kecil terluar. Sedikitnya ada 12 pulau yang seolah

ditelantarkan. Tidak sedikit yang tidak berpenghuni dan hanya diawasi dari Angkatan Laut yang berpatroli secara berkala. Ada pula yang berpenduduk, tapi kehidupan mereka amat bergantung pada negara tetangga seperti Pulau Miangas di Sulawesi Utara. Begitu juga Kepulauan Mapia di Samudera Pasifik. Ini juga termasuk pulau yang jarang muncul di peta yang dipakai anak-anak sekolah.

Lain halnya dengan Pulau Rondo di ujung Nangroe Aceh Darussalam. Pulau ini amat penting karena inilah pulau paling utara di Indonesia. Dengan koordinat 6 lintang utara dan 95 bujur timur, Rondo berhadapan langsung dengan India. Tapi pulau ini hanya "dijaga" oleh mercusuar, tak ada penduduknya. Begitu pula Pulau Benggala di dekatnya. Pulau ini pun sebuah noktah berharga karena berada paling barat, dengan koordinat 5 derajat lintang utara dan 94 bujur timur. Pulau Dana di Samudera Hindia, masuk dalam wilayah Nusa Tenggara Timur, inilah pulau paling selatan di Indonesia, berseberangan langsung dengan Australia. Keadaan yang sama terjadi di Pulau Batek yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, beberapa warga di Kampung kabuka mengira Presiden Indonesia masih Soeharto.

Semua kenyataan itu menunjukkan, pemerintah kurang memperhatikan pulau terluar. Persoalan tak hanya menyangkut pulau-pulau terluar, tapi juga di perbatasan di darat. Ini terjadi di Nusa Tenggara Timur yang berhimpitan dengan Timor Leste, Papua yang bertetangga dengan Papu Nugini, dan Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia. Titik-titik perbatasan selalu menjadi pintu masuk atau pintu keluar barang-barang selundupan. Orang Indonesia di perbatasan juga amat tergantung kehidupannya pada negara tetangga. Inilah kenyataan yang hadir di Badau, sebuah titik perbatasan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Belum lagi sejumlah perjanjian tentang batas perairan termasuk batas zona ekonomi eksklusif, terutama dengan Singapura dan Malaysia. Hal ini pula yang membuat persoalan seperti blok Ambalat bisa meletik. Blok di perairan Kalimantan Timur ini diklaim masuk wilayah Malaysia, walaupun landas laut di sana sebenarnya merupakan kelanjutan alamiah landas wilayah Kalimantan.

Itulah setumpuk persoalan yang mesti diatasi pemerintahan Yudhoyono demi menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari Benggala sampai ujung Papua. Dihadapkan dengan masalah lain seperti kemiskinan, pendidikan, hak asasi manusia, demokrasi, dan juga globalisasi atau internasionalisme, mungkin urusan tersebut terlalu "nasionalis". Tapi dalam banyak hal keduanya bisa disatukan. Menjaga pulau-pulau terluar bisa dilakukan dengan mengangkat kesejahteraan dan meningkatkan pendidikan penduduk di sana.

Untuk dapat menyelesaikannya memang dibutuhkan suatu proses yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dan bagaimanapun juga upaya penyelesaiannya diharapkan tidak mengganggu keharmonisan hubungan Negara Indonesia dengan Negara tetangga yang kebetulan berbatasan dengan wilayah tersebut, serta dapat memberikan suatu hasil kesepakatan sekaligus berarti menyelesaikan sengketa yang ada.

D. Pokok Permasalahan

Dari uraian diatas, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini adalah **bagaimana upaya pemerintah Republik Indonesia menjaga wilayah perbatasan Indonesia?**

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Kekuatan Nasional (*National Power*) yang dimiliki suatu Negara atau suatu bangsa, baik yang nyata dan jelas terlihat walaupun yang tersimpan sebagai potensi tetapi siap-siaga untuk digunakan atau diberdayakan. Dalam hal suatu Negara dinilai kuat di bidang ekonomi, tetapi masih relative lemah di bidang pertahanan (militer).

Seperti yang dikemukakan oleh Coulombis dan Wolfe beberapa unsur-unsur¹ kekuatan nasional yang mempunyai peranan kuat dalam pembahasan ini adalah luas wilayah (letak-letak geopolitik atau geostrategik), pendayagunaan (efisiensi), dan kekuatan dan mobilitas militer.

Keberadaan suatu wilayah Negara harus diiringi dengan pendayagunaan berupa pembangunan di segala aspek dan penjagaan keamanan dengan menggunakan kekuatan militer yang solid dan tidak mudah untuk ditembus.

Selain melandaskan pada kekuatan nasional, perspektif Hukum Internasional juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk menganalisa upaya penjagaan wilayah perbatasan Indonesia. Dimana Hukum Internasional menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, pakar Hukum Internasional, didefinisikan sebagai berikut:

“Hukum Internasional Publik; keseluruhan kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas wilayah Negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.”²

Arti yang mempunyai relevansi dengan hubungan internasional adalah sumber-sumber hukum internasional sebagai tempat dapat diketemukannya

¹ Drs. T. May Rudy, S.H., MIR., M.Sc., “*Studi Strategis*”, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal 113.

² Burhan Tsani, “*Hukum dan Hubungan Internasional*”, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal 6.

ketentuan-ketentuan hukum internasional untuk memecahkan persoalan yang timbul dalam hubungan antar Negara.

Sehubungan dengan upaya menjaga wilayah perbatasan Indonesia, langkah yang apapun yang ditempuh, tentu saja harus mengacu pada sumber-sumber hukum yang berlaku. Karena wilayah perbatasan Indonesia meliputi wilayah laut (territorial), maka dari itu sumber atau kaidah hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan adalah hukum laut internasional, diantaranya seperti Konvensi Hukum Laut 1982 atau ketentuan-ketentuan hukum laut lainnya yang mengatur tentang batas wilayah suatu Negara dan tentu saja relevan dengan kasus yang terjadi. Tanpa adanya landasan hukum yang kuat persoalan seperti ini tidak akan dapat diselesaikan secara tuntas.

F. Hipotesa

Dengan melihat permasalahan serta dikaitkan dengan kerangka pemikiran yang telah ditetapkan, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dengan metode induksi (khusus ke umum) dan deduksi (umum ke khusus). Kesimpulan sementara yang dapat ditarik adalah bahwa upaya Pemerintah Indonesia dalam menjaga wilayah perbatasannya cenderung kurang cekatan. Upaya ataupun langkah-langkah yang diambil terlihat selalu ketinggalan dengan apa yang dilakukan oleh pihak atau negara yang juga mempunyai keinginan untuk menguasai wilayah di perbatasan negara kita tersebut. Seperti yang terjadi pada Blok Ambalat, Malaysia sudah lebih dulu mengelola Blok tersebut dengan memberi konsesi penambangan dan pengelolaan minyak di kawasan Ambalat kepada Royah Dutch Shell dan perusahaan lain. Hal ini

memberikan suatu bukti atau pernyataan klaim Malaysia atas Ambalat.³ Setelah kejadian ini Indonesia baru menyatakan protesnya karena juga menganggap Blok ini kepunyaan Indonesia walaupun kurangnya langkah yang diambil untuk memberdayakan Blok Ambalat ini.

Insiden tersebut dapat dicegah dengan berbagai upaya, diantaranya :

- Pemanfaatan SDA
- Penataan hokum dan kelembagaan
- Peningkatan lembaga masyarakat dan pemerintahan
- Peningkatan aksesibilitas ke pulau terluar
- Pengembangan system pertahanan dan keamanan
- Pengembangan ekonomi pulau terluar
- Pengembangan aspek ekonomi dan social budaya
- Penghunian dan pendistribusian penduduk ke pulau terluar

G. Jangkauan Penelitian

Dengan maksud agar pembahasan tidak terlalu meluas, maka penulis akan memberikan batasan terhadap penulisan ini dari dimulainya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai saat ini, dimana pemerintahan ini diharapkan dapat menambal kekurangan yang terdapat pada pemerintahan sebelumnya. Tetapi pembahasan juga akan menyinggung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, yang mempengaruhi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini dalam menjaga wilayah perbatasan Indonesia.

³ *Kompas*, "Indonesia Protes Kontrak Malaysia dengan Shell", 26 Februari 2005.

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini, penulis lebih menitikberatkan pada teknik mengumpulkan data, analisa data, dan kesimpulan. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan. Dengan studi kepustakaan ini penulis berharap nantinya bisa menemukan data-data dan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Sumber data kepustakaan yang penulis gunakan berasal dari berbagai literatur, buku, laporan penelitian, jurnal, situs internet, dan sumber-sumber lainnya yang sekiranya bisa dipergunakan untuk mengupas masalah ini. Kemudian data dianalisa sehingga didapat klasifikasi data yang mendukung dan tidak bagi penulisan ini. Dengan adanya pengelompokkan data, bisa disimpulkan data yang sama disatukan sehingga bisa digunakan di dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai pokok-pokok penting dalam penulisan sebuah skripsi, yang meliputi: alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II akan menjelaskan sejarah terbentuknya NKRI, wilayah perbatasan yang berpotensi konflik atau sengketa.

BAB III berisi mengenai pengertian ketahanan nasional, doktrin hankam Negara Indonesia, konsep Negara kepulauan, dan kawasan nusantara.

BAB IV merupakan pembahasan mengenai pokok-pokok permasalahan dalam kajian ini, yaitu mengenai upaya pemerintah menjaga wilayah perbatasan Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam usaha penjagaan wilayah perbatasan tersebut.

BAB V merupakan kesimpulan yang memberikan kesimpulan umum dari pembahasan yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya.